**HUBUNGAN GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DENGAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA**

**Oleh**

**Nazwa Aphsari Nandini**

**Tugas Mata Kuliah**

**Metode Penelitian Administrasi Publik**

**Pada**

**Jurusan Administrasi Negara**

**Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Poilitik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLIRIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2025**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**I.I LATAR. BELAKANG**

Pembangunan desa merupakan salah satu agenda penting dalam kerangka pembangunan nasional di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengelola pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Desa tidak lagi ditempatkan hanya sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang mandiri dan berperan aktif dalam menentukan arah serta prioritas pembangunan. Undang-undang tersebut menjadi tonggak penting dalam desentralisasi pembangunan karena memberikan legitimasi hukum kepada desa untuk menyusun perencanaan, melaksanakan program, serta mengevaluasi hasil pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat. Momentum ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat terlibat dan sejauh mana kepemimpinan kepala desa mampu menggerakkan partisipasi tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menjadi indikator penting keberhasilan implementasi Undang-Undang Desa. Melalui partisipasi, masyarakat dapat memberikan kontribusi nyata, baik dalam bentuk tenaga, ide, maupun sumber daya material. Semangat gotong royong yang telah mengakar dalam kehidupan pedesaan Indonesia menjadi modal sosial yang seharusnya terus dijaga dan diperkuat dalam praktik pembangunan. Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berbeda-beda antar desa. Ada desa yang warganya sangat aktif dalam musyawarah, bergotong royong, dan menyumbangkan ide dalam perencanaan pembangunan. Tetapi ada pula desa yang masyarakatnya cenderung pasif, bahkan apatis terhadap program-program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa. Perbedaan tingkat partisipasi tersebut tentu tidak lepas dari faktor kepemimpinan kepala desa, khususnya gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam mengelola pemerintahan desa.

Kepala desa memiliki posisi strategis sebagai pemimpin formal sekaligus pengambil kebijakan di tingkat lokal. Ia tidak hanya berperan dalam mengatur administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan yang harus mampu merangkul partisipasi masyarakat. Kepemimpinan yang komunikatif, transparan, dan demokratis diyakini dapat mendorong keterlibatan lebih luas, sedangkan kepemimpinan yang tertutup, elitis, atau otoriter cenderung menimbulkan jarak dengan masyarakat sehingga partisipasi menjadi rendah. Dalam konteks pembangunan desa, gaya kepemimpinan kepala desa menjadi salah satu determinan utama yang menentukan apakah program-program pembangunan berjalan sesuai harapan atau justru menimbulkan konflik dan ketidakpuasan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih jauh hubungan antara gaya kepemimpinan kepala desa dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Permasalahan yang sering muncul di lapangan terkait dengan rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan dana desa, kurangnya komunikasi antara kepala desa dengan warga, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, serta adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan program pembangunan. Keterbatasan dana desa sering kali menyebabkan proyek pembangunan, khususnya infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, berjalan lambat atau tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Selain itu, konflik kepentingan, misalnya dalam hal pembebasan lahan atau tuntutan kompensasi dari warga yang tanahnya digunakan untuk pembangunan, juga sering menjadi penghambat. Namun, penelitian menunjukkan bahwa hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisasi apabila kepala desa memiliki gaya kepemimpinan yang responsif, mampu berkomunikasi secara efektif, dan mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan. Dengan kata lain, gaya kepemimpinan kepala desa menjadi variabel kunci yang menentukan sejauh mana partisipasi masyarakat dapat dimobilisasi.

Kapan isu ini relevan untuk dikaji dapat ditelusuri sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini menjadi momentum penting karena sejak saat itu desa mendapatkan alokasi dana desa yang jumlahnya meningkat setiap tahun. Berdasarkan data Kementerian Desa, sejak tahun 2015 hingga 2023 pemerintah pusat telah menyalurkan dana desa dalam jumlah triliunan rupiah ke seluruh desa di Indonesia. Namun, besar kecilnya dana desa tidak otomatis menentukan keberhasilan pembangunan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat, dan partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan kepala desa. Dengan demikian, periode setelah tahun 2014 hingga saat ini merupakan waktu yang tepat untuk meneliti hubungan antara gaya kepemimpinan kepala desa dengan partisipasi masyarakat, karena dalam kurun waktu tersebut desa memiliki kewenangan luas sekaligus tantangan besar dalam mengelola pembangunan secara mandiri.

Bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa memengaruhi partisipasi masyarakat dapat dilihat dari mekanisme komunikasi, pola pengambilan keputusan, strategi pemberdayaan, serta pendekatan sosial budaya yang diterapkan. Kepala desa yang mengedepankan komunikasi terbuka akan mampu membangun kepercayaan warga, sedangkan pemimpin yang tertutup akan menimbulkan rasa curiga dan mengurangi partisipasi. Pola pengambilan keputusan secara musyawarah juga terbukti lebih efektif meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan dibandingkan keputusan yang diambil sepihak. Lebih lanjut, strategi pemberdayaan yang dilakukan kepala desa, seperti menghidupkan kembali tradisi gotong royong dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, akan memperkuat keterlibatan warga. Dengan demikian, gaya kepemimpinan berfungsi sebagai variabel yang menjembatani aspirasi masyarakat dengan implementasi pembangunan di lapangan.

Sejumlah penelitian empiris juga telah menguatkan pandangan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Andika et al. (2021) di Desa Gedung Wani menemukan bahwa gaya kepemimpinan partisipatif mampu meningkatkan motivasi warga untuk terlibat dalam pembangunan desa, meskipun terdapat kendala pada aspek komunikasi anggaran. Telaumbanua et al. (2024) menunjukkan bahwa kepemimpinan responsif terhadap kondisi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi warga, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Sementara itu, penelitian terbaru oleh Zulfik et al. (2025) menegaskan bahwa gaya kepemimpinan demokratis memang berkontribusi positif terhadap partisipasi masyarakat, terutama dalam pembangunan non-fisik, meskipun pengaruhnya relatif kecil, hanya 13,2%, yang menunjukkan adanya faktor lain yang juga memengaruhi partisipasi. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa merupakan variabel penting, meskipun bukan satu-satunya, dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat.

Literatur akademik juga banyak membahas hubungan kepemimpinan dan partisipasi masyarakat. Agustina Setiawan (2022) dalam bukunya Pemerintahan Desa: Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan Desa menekankan bahwa keterbukaan dan transparansi kepala desa merupakan syarat mutlak agar partisipasi masyarakat dapat tumbuh. Bakry Usman dan Salahuddin (2025) melalui bukunya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa menekankan pentingnya sinergi antara pemimpin desa dengan masyarakat dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu, Tabrani Rusyan (2018) dalam bukunya Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa menyoroti pentingnya kualitas kepemimpinan kepala desa sebagai penentu kepuasan masyarakat sekaligus keberhasilan pembangunan desa. Ketiga buku ini secara konsisten menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang demokratis, transparan, dan partisipatif mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

Fenomena variasi partisipasi masyarakat di berbagai desa, ditambah dengan pentingnya peran kepemimpinan kepala desa, menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu diteliti lebih dalam. Selama ini, banyak penelitian yang membahas partisipasi masyarakat atau gaya kepemimpinan kepala desa secara terpisah. Namun, kajian yang secara khusus membahas hubungan keduanya, terutama dalam konteks pembangunan pasca Undang-Undang Desa 2014, masih terbatas. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut, dengan fokus pada pertanyaan kapan (when) kepemimpinan kepala desa berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat, serta bagaimana (how) gaya kepemimpinan tersebut memengaruhi keterlibatan warga dalam pembangunan desa.

Urgensi penelitian ini semakin jelas ketika melihat bahwa pembangunan desa tidak hanya bertujuan memperbaiki infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan desa harus dilihat sebagai proses sosial yang melibatkan interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, pembangunan berisiko tidak tepat sasaran, tidak berkelanjutan, bahkan menimbulkan konflik. Oleh karena itu, membangun pola kepemimpinan yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga kebutuhan strategis dalam mewujudkan pembangunan desa yang berdaya, inklusif, dan berkelanjutan.

Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional menempatkan masyarakat sebagai aktor utama yang seharusnya berpartisipasi aktif dalam setiap tahapannya. Namun, partisipasi masyarakat tidak akan hadir begitu saja tanpa adanya mekanisme yang jelas dan kepemimpinan yang mampu menggerakkan. Dalam konteks pedesaan, kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai figur sentral yang menentukan arah pembangunan serta pola hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Kehadiran kepala desa yang visioner, komunikatif, dan mampu merangkul warga akan memunculkan iklim pembangunan yang inklusif. Sebaliknya, kepemimpinan yang cenderung otoriter dan tidak transparan justru akan menimbulkan apatisme serta rendahnya partisipasi masyarakat. Dengan demikian, gaya kepemimpinan menjadi variabel yang secara langsung berkorelasi dengan tingkat keterlibatan warga.

Dalam kerangka teoritik, konsep partisipasi masyarakat memiliki dimensi yang luas. Partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran masyarakat dalam kegiatan pembangunan secara fisik, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, hingga evaluasi program. Agustina Setiawan (2022) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa idealnya mencakup tiga aspek utama, yaitu partisipasi dalam musyawarah perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan program, dan partisipasi dalam pengawasan hasil pembangunan. Ketiga aspek tersebut akan berjalan optimal apabila kepala desa memberikan ruang dialog yang cukup, mendorong transparansi informasi, serta menghargai setiap masukan warga. Tanpa adanya kepemimpinan yang inklusif, partisipasi masyarakat berisiko menjadi formalitas belaka, misalnya hanya hadir dalam musyawarah tetapi tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan substantif.

Fenomena ini juga diperkuat oleh penelitian empiris yang menunjukkan adanya hubungan erat antara gaya kepemimpinan dengan partisipasi masyarakat. Penelitian Andika et al. (2021) menemukan bahwa gaya kepemimpinan partisipatif kepala desa mampu meningkatkan motivasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan, meskipun keterbatasan komunikasi anggaran masih menjadi kendala. Penelitian tersebut membuktikan bahwa pola kepemimpinan yang mengedepankan dialog dan keterbukaan lebih efektif dalam membangun rasa memiliki warga terhadap program pembangunan. Sementara itu, Telaumbanua et al. (2024) dalam penelitiannya menekankan pentingnya responsivitas kepala desa terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa kepala desa yang tanggap terhadap keluhan warga dan mampu memberikan solusi konkret berhasil mendorong partisipasi lebih luas, terutama dalam program pembangunan infrastruktur. Hal ini berbeda dengan desa yang kepala desanya kurang responsif, di mana tingkat partisipasi masyarakat cenderung rendah. Penelitian terbaru oleh Zulfik et al. (2025) di Desa Bakajaya juga memberikan gambaran menarik, yakni gaya kepemimpinan demokratis memang berkontribusi pada partisipasi masyarakat, meskipun hanya sebesar 13,2 persen. Artinya, ada faktor lain seperti kondisi sosial-ekonomi, budaya lokal, dan kualitas komunikasi yang turut menentukan partisipasi.

Jika dilihat dari perspektif teoretis lainnya, partisipasi masyarakat juga memiliki keterkaitan erat dengan teori kepemimpinan transformasional. Tabrani Rusyan (2018) menyatakan bahwa kepala desa yang memiliki visi, mampu memberi inspirasi, serta mendorong inovasi akan lebih mudah mendapatkan dukungan masyarakat. Gaya kepemimpinan semacam ini menciptakan ikatan emosional yang kuat antara pemimpin dan masyarakat, sehingga warga merasa bahwa mereka bukan sekadar objek pembangunan, tetapi bagian dari proses perubahan yang lebih besar. Konsep ini sejalan dengan pandangan Usman dan Salahuddin (2025) yang menekankan pentingnya sinergi antara pemimpin dan warga untuk menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan. Mereka berpendapat bahwa pembangunan tidak akan berhasil tanpa adanya harmoni dan kerja sama antara kepala desa dan masyarakat, di mana keduanya sama-sama memiliki kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.

Kapan isu ini relevan untuk diteliti menjadi sangat jelas ketika melihat perjalanan pembangunan desa pasca Undang-Undang Desa 2014. Sejak 2015, pemerintah pusat menyalurkan dana desa dalam jumlah besar dengan harapan dapat meningkatkan pembangunan di tingkat lokal. Hingga tahun 2023, jumlah dana desa yang disalurkan mencapai lebih dari Rp 400 triliun. Namun, efektivitas pemanfaatan dana tersebut sering kali dipertanyakan karena hasil pembangunan tidak selalu sebanding dengan besarnya dana yang dialokasikan. Dalam banyak kasus, pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan memang terlihat nyata, tetapi partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi program sering kali masih rendah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa ada desa yang berhasil memanfaatkan dana desa dengan partisipasi masyarakat yang tinggi, sementara desa lain justru gagal membangun rasa memiliki warganya terhadap pembangunan? Pertanyaan ini menegaskan pentingnya menelaah lebih jauh peran gaya kepemimpinan kepala desa dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa memengaruhi partisipasi masyarakat dapat dilihat melalui pendekatan komunikasi dan budaya lokal. Di desa yang kepala desanya terbiasa mengedepankan musyawarah mufakat, warga cenderung lebih aktif menyampaikan ide dan bersedia berkontribusi dalam pelaksanaan program. Musyawarah tidak hanya menjadi forum formal, tetapi juga ruang bagi warga untuk merasa dihargai. Sebaliknya, di desa yang kepala desanya lebih dominan dalam mengambil keputusan tanpa melibatkan warga, partisipasi sering kali sebatas simbolik, misalnya hanya ikut gotong royong karena merasa terpaksa. Dalam hal ini, gaya kepemimpinan demokratis dan partisipatif terbukti lebih mampu menumbuhkan partisipasi yang berkelanjutan dibandingkan gaya kepemimpinan otoriter.

Selain itu, strategi pemberdayaan yang dilakukan kepala desa juga berpengaruh besar terhadap partisipasi. Kepala desa yang berorientasi pada pemberdayaan akan berusaha menggali potensi lokal, mendorong inisiatif warga, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan dalam mengelola program pembangunan. Hal ini berbeda dengan kepala desa yang hanya berfokus pada pencapaian target fisik tanpa memperhatikan keberlanjutan partisipasi warga. Dalam jangka panjang, strategi pemberdayaan terbukti lebih efektif karena masyarakat merasa memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan desa mereka. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Telaumbanua et al. (2024) mendukung hal ini dengan menunjukkan bahwa desa yang kepala desanya aktif mendorong pemberdayaan justru mengalami peningkatan partisipasi dalam pembangunan infrastruktur maupun non-infrastruktur.

Lebih jauh, dinamika partisipasi masyarakat juga tidak terlepas dari faktor sosial-budaya yang melekat pada kehidupan pedesaan. Nilai-nilai tradisional seperti gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas sosial masih menjadi modal utama yang dapat dimanfaatkan kepala desa. Namun, modal sosial ini tidak akan otomatis berfungsi tanpa adanya kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan nilai tradisional dengan kebutuhan pembangunan modern. Kepala desa yang mampu menghidupkan kembali tradisi gotong royong dalam konteks pembangunan akan lebih mudah menggerakkan partisipasi warga. Sebaliknya, apabila kepala desa mengabaikan nilai budaya lokal, maka partisipasi masyarakat akan melemah karena warga tidak merasa terikat dengan program pembangunan yang dijalankan.

Melihat uraian di atas, jelas bahwa isu hubungan gaya kepemimpinan kepala desa dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan fenomena yang kompleks sekaligus penting untuk diteliti lebih dalam. Kompleksitas ini muncul karena partisipasi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, tetapi juga faktor ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik lokal. Namun, gaya kepemimpinan tetap menjadi faktor kunci yang dapat memperkuat atau melemahkan faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menelaah bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dapat mendorong partisipasi masyarakat, serta pada momen kapan kepemimpinan tersebut memiliki peran yang paling signifikan dalam pembangunan desa.

Isu mengenai hubungan antara gaya kepemimpinan kepala desa dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan tema yang sangat relevan untuk dikaji secara mendalam dalam konteks pembangunan lokal di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Regulasi ini menandai perubahan paradigma besar, di mana desa tidak lagi dipandang sekadar sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang memiliki kewenangan penuh dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Dengan kewenangan yang semakin besar tersebut, kepemimpinan kepala desa menjadi faktor utama yang menentukan arah pembangunan, dan secara bersamaan, keterlibatan masyarakat menjadi aspek yang tak terpisahkan dalam menentukan keberhasilan implementasi pembangunan desa. Hal ini menjadikan isu tentang gaya kepemimpinan dan partisipasi masyarakat semakin penting untuk diteliti dan dianalisis.

Gaya kepemimpinan kepala desa dapat menjadi penentu bagi terciptanya suasana yang kondusif bagi masyarakat dalam berpartisipasi. Pemimpin yang demokratis, terbuka, dan komunikatif dapat mendorong masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam berbagai tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Sebaliknya, gaya kepemimpinan yang otoriter atau tertutup berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat dan melemahkan partisipasi. Dalam kerangka pembangunan desa, partisipasi masyarakat tidak hanya dilihat sebagai bentuk kehadiran dalam forum musyawarah, melainkan juga dalam bentuk kontribusi nyata, baik tenaga, pikiran, ide, maupun sumber daya lainnya. Oleh karena itu, bagaimana kepala desa mengelola kepemimpinannya sangat erat kaitannya dengan tumbuhnya semangat gotong royong dan keterlibatan masyarakat dalam mengawal pembangunan.

Secara teoritis, pemahaman mengenai hubungan gaya kepemimpinan dengan partisipasi masyarakat dapat dijelaskan melalui pandangan para ahli. Menurut Agustina Setiawan dalam bukunya Pemerintahan Desa: Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan Desa (2022), keterbukaan dan transparansi seorang kepala desa merupakan syarat mutlak yang dapat menciptakan rasa dihargai bagi masyarakat sehingga mereka terdorong untuk ikut serta dalam setiap tahapan pembangunan. Lebih lanjut, Bakry Usman dan Salahuddin dalam Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa(2025) menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila terjadi sinergi yang baik antara pemimpin desa dengan masyarakatnya. Tabrani Rusyan dalam bukunya Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa (2018) menambahkan bahwa kualitas kepemimpinan kepala desa merupakan faktor yang menentukan kepuasan masyarakat dan berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pembangunan di tingkat lokal. Pemikiran-pemikiran ini memperkuat pandangan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa menjadi faktor kunci yang tidak bisa diabaikan dalamX proses pembangunan desa.

Selain literatur berupa buku, kajian-kajian akademik dalam jurnal juga memberikan penjelasan empiris mengenai pentingnya peran kepemimpinan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Andika et al. (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan partisipatif mampu mendorong motivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan desa, meskipun tantangan dalam aspek komunikasi masih sering muncul. Telaumbanua et al. (2024) menekankan bahwa kepemimpinan yang responsif terhadap kondisi sosial masyarakat dapat menumbuhkan rasa percaya, yang pada akhirnya berimplikasi pada meningkatnya partisipasi dalam pembangunan, terutama di bidang infrastruktur. Zulfik et al. (2025) menyoroti bahwa gaya kepemimpinan demokratis memang memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan non-fisik di desa, meskipun pengaruhnya relatif kecil dan menunjukkan adanya faktor-faktor lain yang ikut memengaruhi. Jurnal-jurnal tersebut memperlihatkan bahwa kepemimpinan bukan satu-satunya faktor, namun tetap menjadi salah satu unsur paling dominan dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi.

Konteks waktu juga menjadi penting dalam pembahasan isu ini. Sejak Undang-Undang Desa diberlakukan, kewenangan kepala desa dalam mengelola pembangunan semakin besar, dan dengan itu pula semakin jelas bahwa gaya kepemimpinan yang dipraktikkan memiliki dampak jangka panjang terhadap keterlibatan masyarakat. Pembangunan desa bukanlah proses sesaat, melainkan rangkaian berkelanjutan yang menuntut partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, isu mengenai gaya kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat bersifat relevan sepanjang waktu, tidak hanya pada momen tertentu. Relevansi ini diperkuat oleh dinamika sosial, ekonomi, dan budaya di desa yang selalu berkembang dan menuntut adanya pendekatan kepemimpinan yang adaptif, komunikatif, serta mampu merangkul berbKK,agai kepentingan masyarakat.

Cara atau mekanisme yang digunakan kepala desa dalam memimpin juga berperan penting dalam memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Melalui komunikasi yang intensif dan transparan, masyarakat dapat memahami arah pembangunan desa dan merasa memiliki peran dalam menentukan kebijakan. Pola pengambilan keputusan yang inklusif memungkinkan masyarakat memberikan masukan dan ide, sehingga pembangunan tidak hanya ditentukan dari atas ke bawah, melainkan juga berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Strategi pemberdayaan yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan dapat memperkuat rasa memiliki, sedangkan pendekatan sosial budaya yang sesuai dengan kearifan lokal menjadikan masyarakat lebih mudah menerima kebijakan yang dijalankan. Dengan demikian, bagaimana kepala desa mempraktikkan gaya kepemimpinannya sangat menentukan apakah partisipasi masyarakat akan berkembang secara optimal atau justru melemah.

Dalam kerangka akademik, hubungan antara kepemimpinan dan partisipasi masyarakat dapat pula dijelaskan melalui teori partisipasi dalam pembangunan. Teori ini menekankan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya bentuk kontribusi sukarela, melainkan juga mekanisme untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Partisipasi yang aktif akan menciptakan legitimasi bagi kebijakan desa sekaligus memperkuat akuntabilitas kepala desa. Literatur dan hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang responsif, terbuka, dan demokratis merupakan prasyarat penting dalam membangun partisipasi yang kuat. Tanpa kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat, pembangunan desa berisiko kehilangan legitimasi dan tidak akan berjalan efektif.

Kepemimpinan kepala desa juga harus dipahami dalam konteks tantangan kontemporer. Perkembangan teknologi informasi, misalnya, menuntut adanya kepemimpinan yang mampu memanfaatkan media digital sebagai sarana komunikasi pembangunan dengan masyarakat. Transparansi anggaran dan program pembangunan dapat lebih mudah diwujudkan melalui teknologi, tetapi pada saat yang sama menuntut kepala desa untuk memiliki keterampilan dalam mengelola informasi secara efektif. Tantangan lain adalah munculnya kompleksitas kebutuhan masyarakat desa, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Semua itu membutuhkan kepemimpinan yang adaptif dan inovatif agar mampu mengelola potensi desa secara optimal, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi.

Dengan memahami isu ini secara mendalam, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara gaya kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan aspek yang fundamental dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Regulasi yang memberikan kewenangan besar kepada desa menjadi dasar penting, tetapi implementasinya sangat ditentukan oleh bagaimana kepala desa memimpin dan sejauh mana masyarakat merasa dilibatkan. Literatur akademik baik berupa buku maupun jurnal telah memperkuat pemahaman bahwa kepemimpinan yang efektif, terbuka, dan demokratis adalah syarat utama bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian dan kajian lebih lanjut mengenai isu ini tetap diperlukan, agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan praktik kepemimpinan desa yang lebih baik serta pembangunan desa yang benar-benar berpihak pada masyarakat.

Dalam konteks pembangunan desa di Indonesia, penting pula untuk meninjau fenomena ini dari perspektif keberlanjutan (sustainability). Pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek seperti penyediaan infrastruktur, tetapi juga pada bagaimana masyarakat mampu mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan tersebut untuk masa depan. Hal ini menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan desa erat kaitannya dengan sejauh mana masyarakat merasa memiliki (sense of ownership) terhadap program yang dijalankan. Gaya kepemimpinan kepala desa menjadi faktor penentu dalam menumbuhkan rasa memiliki ini. Seorang kepala desa yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, memberikan transparansi mengenai alokasi dana, serta menghargai aspirasi warga akan lebih berhasil menumbuhkan rasa kepemilikan dibandingkan dengan pemimpin yang hanya berorientasi pada pencapaian fisik semata. Dalam kerangka ini, partisipasi masyarakat bukan hanya sebatas kontribusi, melainkan juga bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pembangunan. Dengan adanya kontrol sosial yang kuat, maka keberlanjutan pembangunan desa dapat lebih terjamin, karena masyarakat turut serta menjaga, mengawasi, dan mengembangkan hasil pembangunan.

Selain itu, hubungan antara kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat juga dapat dianalisis melalui pendekatan politik lokal. Kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai aktor politik yang harus mampu mengelola dinamika kepentingan warga. Dalam banyak kasus, rendahnya partisipasi masyarakat justru dipengaruhi oleh adanya dominasi kelompok tertentu atau praktik patronase yang melemahkan keterlibatan masyarakat secara luas. Kepemimpinan yang demokratis dan inklusif dapat menjadi solusi untuk meminimalisasi ketimpangan ini dengan cara membuka ruang bagi semua kelompok masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Dengan demikian, gaya kepemimpinan kepala desa tidak hanya memengaruhi aspek teknis pembangunan, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga kohesi sosial serta stabilitas politik lokal. Kajian ini menjadi semakin relevan karena pembangunan desa yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila terjadi harmoni sosial dan politik di tingkat lokal, di mana kepala desa berfungsi sebagai penghubung antara berbagai kepentingan masyarakat.

Dengan memperhatikan dimensi keberlanjutan dan politik lokal, jelaslah bahwa gaya kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat merupakan dua variabel yang saling berkaitan erat dalam menentukan kualitas pembangunan desa. Penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan hubungan keduanya secara teoritis dan empiris, tetapi juga berkontribusi dalam memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan kapasitas kepemimpinan desa. Kepala desa diharapkan mampu mengembangkan gaya kepemimpinan yang demokratis, komunikatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman, sehingga partisipasi masyarakat dapat tumbuh secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya menghasilkan perubahan fisik, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap tahapan pembangunan demi tercapainya kesejahteraan bersama.

**DAFTAR PUSTAKA**

* Setiawan, A. (2022). Pemerintahan desa: Partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa. Jakarta: Prenada Media.
* Usman, Bakry dan Salahuddin. 2025. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Yogyakarta: Deepublish.
* Rusyan, Tabrani. 2018. Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa.
* Andika, et al. 2021. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Gedung Wani. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 9(2).
* Telaumbanua, et al. 2024. Kepemimpinan Responsif dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa. Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik, Vol. 12(1).
* Zulfik, et al. 2025. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis terhadap Partisipasi Masyarakat di Desa Bakajaya. Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan, Vol. 15(1).